

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Penentuan jenis barang kebutuhan pokok dan barang penting (bapokting) didasarkan pada **Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2020** tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting. Perkembangan harga kebutuhan pokok nasional Triwulan II dapat dikatakan cukup stabil tanpa fluktuasi yang signifikan, kecuali komoditas cabai merah besar, cabai merah keriting, dan cabai rawit merah yang mencapai harga lebih tinggi di bulan April dibandingkan bulan setelahnya. Selanjutnya dilakukan pemantauan harga kebutuhan pokok masyarakat pada pasar tradisional di Kota Pekalongan selama periode Triwulan II Tahun 2025 (bulan April - Juni 2025).

Dari pemantauan harga 16 kebutuhan pokok, ditemukan bahwa pada bulan April 2025 harga beberapa kebutuhan pokok lebih tinggi dari bulan Mei dan Juni, komoditas tersebut adalah bawang merah dan cabai rawit merah. Sementara itu harga komoditas-komoditas lain juga mengalami fluktuasi namun tidak terlalu besar.

Pada Triwulan II 2025, harga kebutuhan pokok di Pekalongan cenderung lebih rendah dari rata-rata nasional, komoditas tersebut adalah beras medium, telur ayam ras, gula pasir, daging sapi, bawang putih honan, tepung terigu, cabai merah besar, cabai merah keriting, dan minyak goreng kemasan. Harga cabai rawit merah pada April 2025 sempat lebih tinggi dari harga rata-rata nasional, namun pada bulan Mei dan Juni harganya turun di bawah harga rata-rata nasional. Harga minyak goreng curah pada April 2025 sama dengan harga rata-rata nasional, sedangkan pada bulan Mei dan Juni harganya turun di bawah rata-rata nasional. Terdapat empat komoditas yang secara rata-rata harganya berada di atas harga rata-rata nasional, yaitu beras premium, gula pasir, bawang merah, dan minyak. Harga beberapa komoditas yang masih tinggi di bulan April masih berhubungan dengan momen periode lebaran.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Kendala yang masih dihadapi oleh TPID Kota Pekalongan dalam melaksanakan strategi pengendalian inflasi 4K hingga periode Triwulan II Tahun 2025 ini, antara lain:

1. Masih tingginya alih fungsi lahan pertanian sehingga produksi pangan semakin menurun;
2. Mekanisme pasar menjadi salah satu faktor pembentuk harga pada komoditas pangan, seperti cabe rawit, cabe merah, dan bawang merah, yang tidak terkait dengan jumlah ketersediaan (supply) maupun tingkat kebutuhan/permintaan (demand);
3. Kota Pekalongan bukan merupakan daerah pemasok sehingga harga ditentukan dari daerah pemasok atau daerah penghasil
4. Cuaca dan bencana alam yang tidak dapat diprediksi, juga menjadi faktor yang berpengaruh terhadap jumlah ketersediaan stok yang bermuara pada fluktuasi harga

pada beberapa komoditas pangan di Kota Pekalongan;

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

3. Pelaksanaan Kebijakan Pengendalian Inflasi di Daerah

Pelaksanaan Program Kerja Tim Pengendalian Inflasi Daerah di Kota Pekalongan pada Triwulan II Tahun 2025 sebagai berikut :

- Rapat Koordinasi minggu II bulan April 2025 membahas langkah konkrit pengendalian inflasi di daerah yang dilaksanakan pada :

Hari / Tanggal : Senin / 14 April 2025

Tempat : Ruang Dua Negeri Setda Kota Pekalongan

Jl. Mataram No. 1 Pekalongan

Rapat dipimpin oleh Sekjen Kementerian Dalam Negeri Tomsu Tohir secara zoom meeting. Peserta rapat yaitu Perwakilan Kantor Staf Presiden, Perwakilan Panglima TNI, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kepala Badan Pusat Statistik, Badan Pangan Nasional, Kemendiknas, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Satgas Pangan Polri, Badan Urusan Logistik (Bulog), para Kepala Daerah dan Forkopimda se-Indonesia.

Hasil :

1. Inflasi Tahun ke Tahun (Maret 2025 terhadap Maret 2024) sebesar 1,03%. Inflasi Bulan ke Bulan (Maret 2025 terhadap Februari 2025) sebesar 1,65%.
2. Inflasi bulan ke bulan bukan hanya disebabkan oleh sebagian besar makanan, minuman dan tembakau tetapi karena berakhirnya diskon listrik yang 50% sehingga harga listrik yang diterima konsumen dibandingkan dengan Bulan Februari pastinya akan lebih tinggi.
3. Komoditas yang menyumbang inflasi Maret 2025 adalah komoditas pangan yang merupakan komoditas kelompok makanan, minuman dan tembakau. Beberapa komoditas dengan andil yang cukup besar adalah bawang merah, cabai rawit, dan daging ayam ras dengan tingkat inflasi Maret 2025 masing-masing sebesar 24,07%, 13,67% dan 1,64%.
4. Secara nasional, rata-rata harga bawang merah pada M2 April 2025 berada di atas rentang Harga Acuan Penjualan (HAP). Secara umum, harga bawang merah s.d M2 April 2025 naik 8,67% dibanding Maret 2025. Untuk harga cabai rawit, rata-rata harga cabai rawit pada M2 April 2025 berada di atas rentang Harga Acuan Penjualan (HAP). Secara umum, harga cabai rawit s.d M2 April 2025 turun 6,15% dibanding Maret 2025. Sedangkan untuk harga cabai merah, rata-rata harga cabai merah pada M2 April 2025 berada di atas rentang Harga Acuan Penjualan (HAP). Secara umum, harga cabai merah s.d M2 April 2025 naik 3,79% dibanding Maret 2025.
5. Rakor Pengendalian Inflasi dirangkai dengan Sosialisasi penyelenggaraan Sekolah Unggulan Garuda. Wamendiknas Stella Christie dalam paparannya menyampaikan mengenai Seleksi Terbuka Lokasi Pembangunan SMA Unggul Garuda Baru. Stella Christie mengutarakan Sekolah Unggul Garuda merupakan gagasan langsung dari presiden RI Prabowo Subianto yang menginginkan adanya Sekolah Unggul di semua pelosok. Hal ini juga tertuang pada Asta Cita presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran pada point keempat yakni memperkuat pembangunan sumber daya manusia

(SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender serta penguatan peran perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas.

- Rapat Koordinasi minggu III bulan April 2025 membahas langkah konkrit pengendalian inflasi di daerah yang dilaksanakan pada :

Hari / Tanggal : Senin / 21 April 2025

Tempat : Ruang Dua Negeri Setda Kota Pekalongan

Jl. Mataram No. 1 Pekalongan

Rapat dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri (Bp. Tito Karnavian) secara zoom meeting;. Peserta rapat, Kepala Staf Presiden, Perwakilan Panglima TNI, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kepala Badan Pusat Statistik, Badan Pangan Nasional, Menko Bidang Pangan, Menteri Sosial, Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kementerian KPM RI, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Satgas Pangan Polri, Badan Urusan Logistik (Bulog), para Kepala Daerah dan Forkopimda se-Indonesia;

Hasil :

1. Rakor dipimpin langsung Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Tito Karnavian. Dalam arahannya, Mendagri RI menyampaikan mengenai isu inflasi. Berdasarkan rilis BPS, inflasi Tahun ke Tahun (Maret 2025 terhadap Maret 2024) sebesar 1,03% dan inflasi Bulan ke Bulan 9Maret 2025 terhadap Februari 2025) 1,65%. Target inflasi nasional 2,5% plus minus 1%. Artinya, masih aman di rentang 1,5% sampai 3,5%. Jadi angka 1,03% itu menyenangkan konsumen.
2. Tinjauan Inflasi dan Indeks Perkembangan Harga Minggu ke-3 April 2025 menyampaikan pada M3 April 2025, terdapat 23 provinsi yang mengalami kenaikan IPH, 14 provinsi yang mengalami penurunan IPH dan 1 provinsi stabil dibandingkan bulan sebelumnya. Komoditas penyumbang andil kenaikan IPH di 23 provinsi yang mengalami kenaikan IPH adalah bawang merah dan cabai merah, secara nasional jumlah kabupaten/ kota yang mengalami kenaikan IPH pada M3 April 2025 lebih banyak dibandingkan kabupaten/ kota yang mengalami penurunan IPH.
3. Secara nasional, rata-rata harga bawang merah pada M3 April 2025 berada di atas rentang Harga Acuan Penjualan (HAP). Secara umum, harga bawang merah s.d M3 April 2025 naik 9,18% dibanding Maret 2025. Selanjutnya, rata-rata harga bawang putih pada M3 April 2025 berada di atas rentang Harga Acuan Penjualan (HAP). Secara umum, harga bawang putih s.d M3 April 2025 naik 1,69% dibanding Maret 2025.
4. Untuk harga minyak goreng (Minyakita), rata-rata harga Minyakita pada M3 April 2025 berada di atas rentang Harga Eceran Tertinggi (HET). Secara umum, harga Minyakita s.d M3 April 2025 turun 0,36% dibanding Maret 2025. Sedangkan, rata-rata harga gula pasir pada M3 April 2025 berada di atas rentang Harga Acuan Penjualan (HAP). Secara umum, harga gula pasir s.d M3 April 2025 naik 0,14% dibanding Maret 2025.
5. Rakor dirangkai dengan Sosialisasi Penyelenggaraan Sekolah Rakyat.

Rapat Koordinasi minggu IV bulan April 2025 membahas langkah konkrit pengendalian inflasi di daerah yang dilaksanakan pada :

Hari / Tanggal : Senin / 28 April 2025

Tempat : Ruang Dua Negeri Setda Kota Pekalongan

Jl. Mataram No. 1 Pekalongan

Rapat dipimpin oleh Sekjen Kementerian Dalam Negeri Tomsu Tohir secara zoom meeting;

Peserta rapat Kepala Staf Presiden, Perwakilan Panglima TNI, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kepala Badan Pusat Statistik, Badan Pangan Nasional, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Satgas Pangan Polri, Badan Urusan Logistik (Bulog), para Kepala Daerah dan Forkopimda se-Indonesia;

Hasil :

1. Rakor dipimpin langsung Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Tomsu Tohir dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta. Dalam arahannya, Sekjen Kemendagri Tomsu Tohir berharap pemerintah di daerah untuk bisa betul-betul melaksanakan tugasnya dalam menekan inflasi. Ia menekankan pentingnya peran aktif daerah dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok di tengah kondisi ekonomi yang masih penuh tantangan.
2. Pemerintah Daerah Turun langsung ke pasar rutin mengecek perubahan harga serta melaksanakan langkah-langkah seperti rapat koordinasi, pengecekan, operasi pasar, dan beberapa langkah lainnya sampai bantuan subsidi akomodasi atau pengangkutan.
3. Pada M4 April 2025, terdapat 18 provinsi yang mengalami kenaikan IPH dan 20 provinsi yang mengalami penurunan IPH dibandingkan bulan sebelumnya. Komoditas penyumbang andil kenaikan IPH di 18 provinsi yang mengalami kenaikan IPH adalah bawang merah dan cabai merah.
4. Secara nasional, rata-rata harga bawang merah pada M4 April 2025 berada di atas rentang Harga Acuan Penjualan (HAP). Secara umum, harga bawang merah s.d M4 April 2025 naik 8,09% dibanding Maret 2025. Demikian rata-rata harga cabai merah pada M4 April 2025 berada di atas rentang HAP. Secara umum, harga cabai merah s.d M4 April 2025 naik 5,04% dibanding Maret 2025.
5. Rata-rata harga bawang putih pada M4 April 2025 berada di atas HAP. Secara umum, harga bawang putih s.d M4 April 2025 naik 1,39% dibanding Maret 2025. Sedangkan rata-rata harga cabai rawit pada M4 April 2025 berada di atas rentang HAP. Secara umum harga cabai rawit s.d M4 April 2025 turun 8,10% dibanding Maret 2025. Sementara itu, rata-rata harga Minyakita pada M4 April 2025 berada di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). Secara umum, harga Minyakita s.d M4 April 2025 turun 0,37% dibanding Maret 2025. Harga gula pasir rata-rata pada M4 April 2025 berada di atas HAP. Secara umum harga gula pasir s.d M4 April 2025 naik 0,14% dibanding Maret 2025.

- Rapat Koordinasi minggu I bulan Mei 2025 membahas langkah konkrit pengendalian inflasi di daerah yang dilaksanakan pada :

◦

Hari / Tanggal : Senin / 5 Mei 2025

Tempat : Ruang Dua Negeri Setda Kota Pekalongan

Jl. Mataram No. 1 Pekalongan

Rapat dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri (Bp. Tito Karnavian) secara zoom meeting. Peserta rapat yaitu Perwakilan Kantor Staf Presiden, BPS, Badan Pangan Nasional, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Satgas Pangan Polri,, para Kepala Daerah dan Forkopimda se-Indonesia;

Hasil :

1. Narasumber BPS menyampaikan bahwa pada bulan April 2025, 146 Kabupaten/ Kota mengalami inflasi, 5 Kabupaten/Kota mengalami deflasi.
2. Narasumber Kantor Staf Presiden menyampaikan hasil pemantauan harga pangan strategis. Beberapa komoditas yang status harganya tidak aman dan disparitas harga antar daerah tinggi antara lain cabai rawit merah dan daging ayam ras.
3. Narasumber Badan Pangan Nasional menyampaikan beberapa aksi untuk menjaga stabilitas dan inflasi pangan tahun 2025, yaitu dengan melakukan beberapa program antara lain ; pemantauan dan pengawasan harga, Gerakan Pangan Murah, Fasilitasi Distribusi Pangan, kios pangan, penyaluran SPHP beras dan bantuan pangan, penyaluran SPHP jagung, serta aksi bela beli daging dan telur ayam ras.
4. Narasumber Kementerian Perdagangan menyampaikan program untuk mendukung upaya stabilisasi pasokan dan harga minyak goreng serta komoditas terpilih. Dilakukan melalui dukungan distribusi oleh BUMN pangan.
5. Narasumber Polri menyampaikan upaya Satgas Pangan Polri dalam hal melakukan langkah mitigasi harga komoditas. Antara lain dengan intervensi pasar dan mapping secara komprehensif dari tingkat produsen hingga pengecer.
6. Narasumber Kejaksaan menyampaikan beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka pengendalian inflasi daerah, antara lain Pendampingan Penggunaan Belanja Tak Terduga, Partisipasi dalam Operasi Pasar, Pasar Murah, dan Pengawasan Distribusi.
7. Nasarumber TNI menyamapaikan program prioritas nasional dalam hal pengendalian inflasi, antara lain dengan program Bhakti Sosial, Pendampingan Program Swasembada Pangan, Surya Bhaskara Jaya.

- Rapat Koordinasi minggu II bulan Mei 2025 membahas langkah konkrit pengendalian inflasi di daerah :

Hari / Tanggal : Rabu / 14 Mei 2025

Tempat : Ruang Dua Negeri Setda Kota Pekalongan

Jl. Mataram No. 1 Pekalongan

Rapat dipimpin oleh Plt. Sekjen Kementerian Dalam Negeri Tomsu Tohir secara zoom meeting. Peserta rapat antara lain ; Perwakilan Kantor Staf Presiden, Perwakilan Panglima TNI, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kepala Badan Pusat Statistik, Badan Pangan Nasional,

Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Satgas Pangan Polri, Badan Urusan Logistik (Bulog), para Kepala Daerah dan Forkopimda se-Indonesia;

Hasil :

1. Narasumber BPS menyampaikan bahwa pada bulan April 2025, 146 Kabupaten/ Kota mengalami inflasi, 5 Kabupaten/Kota mengalami deflasi.
 2. Narasumber Kantor Staf Presiden menyampaikan hasil pemantauan harga pangan strategis. Beberapa komoditas yang status harganya tidak aman dan disparitas harga antar daerah tinggi antara lain cabai rawit merah dan daging ayam ras.
 3. Narasumber Badan Pangan Nasional menyampaikan beberapa aksi untuk menjaga stabilitas dan inflasi pangan tahun 2025, yaitu dengan melakukan beberapa program antara lain ; pemantauan dan pengawasan harga, Gerakan Pangan Murah, Fasilitasi Distribusi Pangan, kios pangan, penyaluran SPHP beras dan bantuan pangan, penyaluran SPHP jagung, serta aksi bela beli daging dan telur ayam ras.
 4. Narasumber Kementrian Perdagangan menyampaikan program untuk mendukung upaya stabilisasi pasokan dan harga minyak goreng serta komoditas terpilih. Dilakukan melalui dukungan distribusi oleh BUMN pangan.
 5. Narasumber Polri menyampaikan upaya Satgas Pangan Polri dalam hal melakukan langkah mitigasi harga komoditas. Antara lain dengan intervensi pasar dan mapping secara komprehensif dari tingkat produsen hingga pengecer.
 6. Narasumber Kejaksaan menyampaikan beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka pengendalian inflasi daerah, antara lain Pendampingan Penggunaan Belanja Tak Terduga, Partisipasi dalam Operasi Pasar, Pasar Murah, dan Pengawasan Distribusi.
 7. Nasarumber TNI menyamapaikan program prioritas nasional dalam hal pengendalian inflasi, antara lain dengan program Bhakti Sosial, Pendampingan Program Swasembada Pangan, Surya Bhaskara Jaya.
- Rapat Koordinasi minggu III bulan Mei membahas langkah konkrit pengendalian inflasi di daerah tahun 202

Hari / Tanggal : Senin / 19 Mei 2025

Tempat : Ruang Dua Negeri Setda Kota Pekalongan

Jl. Mataram No. 1 Pekalongan

Rapat dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri (Bp. Tito Karnavian) secara zoom meeting. Peserta rapat antara lain ; Perwakilan Kantor Staf Presiden, Perwakilan Panglima TNI, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kepala Badan Pusat Statistik, Badan Pangan Nasional, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Satgas Pangan Polri, Badan Urusan Logistik (Bulog), para Kepala Daerah dan Forkopimda se-Indonesia.

Hasil :

1. Tingkat inflasi Kota Pekalongan Bulan April 2025 (mengacu Tegal sebagai SBH) sebesar 1,56. Kota Pekalongan tidak termasuk masuk dalam 3 (tiga) besar Kota Inflasi tertinggi di Jawa.
2. Narasumber Menko Pangan membahas tentang progres pelaksanaan INPRES No. 9

Tahun 2025 tentang percepatan pembentukan koperasi desa/kelurahan merah putih. Memberikan masukan kepada Menteri Dalam Negeri untuk mendorong gubernur dan bupati/walikota agar memfasilitasi pembentukan 80.000 koperasi desa/kelurahan merah putih.

3. Narasumber Badan Pangan Nasional menyampaikan perkembangan pangan nasional. Diinformasikan bahwa ketersediaan pangan aman dan cukup di tahun 2025. Harga pangan secara umum stabil, saat ini yang menjadi concern harga di tingkat produsen JPK, Livebird, telur ayam ras, sedangkan di tingkat konsumen beras medium, bawang putih, dan minyak. Pemerintah terus berupaya agar harga tetap terkendali.
4. Narasumber Kementerian Perdagangan menyampaikan langkah konkret untuk mendukung stabilisasi pasokan dan harga minyak goreng serta komoditas terpilih. Telah dilakukan pemantauan produksi dan distribusi minyak goreng dan menghimbau dinas terkait untuk secara aktif berkoordinasi dan mengarahkan pendistribusian secara langsung ke pedagang di pasar pantauan.
5. Narasumber Kemen Pertanian menjelaskan perihal jalur pemasaran eksisting / distribusi cabai di Indonesia. Diketahui bahwa perlu tambahan tanam cabe besar per provinsi. Sementara itu untuk komoditi lain seperti daging ayam dan daging sapi secara teknis tidak mengalami masalah namun tetap dilakukan pemantauan perkembangan harganya.
6. Narasumber dari Bulog menyampaikan upaya Perum Bulog dalam stabilisasi harga pangan. Salah satunya adalah dengan realisasi pengadaan jagung tahun 2025. Disampaikan juga bahwa saat ini jumlah stok cadangan beras pemerintah merupakan yang terbesar dalam sejarah, total stok Bulog mencapai 3,7 juta ton dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

- Rapat Koordinasi minggu IV bulan Mei membahas langkah konkret pengendalian inflasi di daerah tahun 2025 :

Hari / Tanggal : Senin / 26 Mei 2025

Tempat : Ruang Dua Negeri Setda Kota Pekalongan

Jl. Mataram No. 1 Pekalongan

Rapat dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri (Bp. Tito Karnavian) secara zoom meeting; Peserta rapat antara lain ; Perwakilan Kantor Staf Presiden, Perwakilan Panglima TNI, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kepala Badan Pusat Statistik, Badan Pangan Nasional, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Satgas Pangan Polri, Badan Urusan Logistik (Bulog), para Kepala Daerah dan Forkopimda se-Indonesia.

Hasil :

1. Narasumber Mendagri menjelaskan tentang tren tingkat inflasi di Indonesia, saat ini tingkat inflasi nasional tahun ke tahun adalah 1,95%, sedangkan inflasi bulan ke bulan sebesar 1,17%. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada triwulan I 2025 tumbuh positif sebesar 4,87%. Mendagri juga kembali membahas progres pendirian koperasi desa/kelurahan merah putih.
2. Narasumber Bappenas membahas peran Bappenas dalam pengendalian inflasi. Strategi yang digunakan adalah melalui pengendalian 4K, yaitu Ketersediaan Pasokan, Keterjangkauan Harga, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif. Saat ini

pertumbuhan ekonomi masih menghadapi beberapa hambatan, yaitu hambatan dalam sistem perizinan, keterbatasan infrastruktur, dan permasalahan produktivitas sektoral. Strategi yang dapat dilakukan untuk percepatan pertumbuhan ekonomi adalah mengidentifikasi sumber pertumbuhan baru, mengoptimalkan infrastruktur yang telah dibangun, meningkatkan iklim investasi, pemanfaatan skema pendanaan inovatif, membangun SDM dan tenaga kerja terampil.

3. Narasumber BPS membahas perkembangan inflasi pada empat bulan pertama tahun 2025. Selama periode tersebut Indonesia sempat mengalami 2 kali deflasi bulan ke bulan pada Januari dan Februari masing-masing sebesar 0,76% dan 0,46% kemudian 2 kali inflasi bulan ke bulan pada Maret dan April sebesar 1,65% dan 1,17%. Pada minggu ke 4 bulan Mei 2025 terdapat 5 provinsi yang mengalami kenaikan IPH dibandingkan bulan sebelumnya. Komoditas penyumbang andil kenaikan IPH di 5 Provinsi yang mengalami kenaikan IPH adalah cabai rawit dan cabai merah.
 4. Narasumber Kantor Staf Presiden menyampaikan laporan hasil pemantauan status harga pangan strategis. Saat ini komoditas dengan status harga tidak aman adalah minyakita dan bawang putih dan beras medium (zona 3). Sementara itu komoditas yang termasuk memiliki disparsitas harga tinggi adalah cabai merah keriting, cabai rawit merah, bawang merah, jagung tingkat peternak, telur ayam ras, dan daging ayam ras.
 5. Narasumber Badan Pangan Nasional membahas tentang perkembangan harga komoditas. Saat ini harga di tingkat produsen untuk liverbird berada dalam status perlu intervensi dan telur ayam ras pada status waspada. Harga bawang putih khususnya untuk wilayah Indonesia Timur berada dalam status perlu intervensi. Berdasarkan panel harga pangan tingkat konsumen, secara nasional harga beras medium berada pada status perlu intervensi untuk zona 1, zona 2, dan zona 3. Badan Pangan Nasional telah bersurat kepada Kepala Dinas yang menangani urusan pangan di seluruh provinsi dan Kab/Kota perihal optimaliasasi pendistribusian Minyakita sesuai dengan HET.
 6. Narasumber Kementerian Pertanian menyampaikan perlu penambahan tanam/ternak setahun sehingga mampu memasok kebutuhan secara mandiri. Solusi jangka pendek yang dapat dilakukan antara lain dengan memantau dan memperlancar pasokan distribusi dari daerah surplus ke wilayah defisit, logistik, dan pasar. Sedangkan jangka menengah/panjangnya adalah bagi wilayah defisit, memacu produksi dengan luasan sesuai target, bagi wilayah surplus untuk hilirisasi dan ekspor secara bertahap.
 7. Narasumber Bulog menyampaikan bahwa saat ini total pengadaan GKP sebesar 3 juta ton, jadi total pengadaan beras dalam negeri tahun 2025 sebesar 2.326.025 ton, sehingga stok Bulog saat ini mencapai 3,8 juta ton. Realisasi distribusi Minyakita sampai dengan 20 Mei 2025 sebanyak 36.304 kilo liter. Realisasi pengadaan jagung pemerintah sebesar 37.716 ton dengan realisasi pengadaan terbesar di Wilayah Lampung.
 8. Narasumber Kementerian Perdagangan membahas perkembangan harga komoditas, khususnya Minyakita. Upaya optimalisasi distribusin Minyakita perlu dilakukan melalui jaringan distribusi eksisting dan melalui BUMN pangan.
 9. Narasumber TNI menjelaskan kegiatan TNI dalam mendukung program prioritas nasional. Untuk swasembada pangan, TNI sudah fokus pada kesiapan dan realisasi luas tanam baik reguler dan optimalisasi lahan, termasuk cetak sawah rakyat komoditas padi di tahun 2025. Untuk pengentasan kemiskinan, TNI tetap fokus pada kegiatan prioritas UO TNI seperti swasembada pangan hingga makan bergizi gratis di tahun 2025
- Rapat Koordinasi minggu I bulan Juni 2025 membahas langkah konkrit pengendalian inflasi di daerah :

Hari / Tanggal : Rabu / 4 Juni 2025

Tempat : Ruang Dua Negeri Setda Kota Pekalongan

Jl. Mataram No. 1 Pekalongan

Rapat dipimpin oleh Sekjen Kementerian Dalam Negeri Tomsu Tohir secara zoom meeting. Peserta rapat antara lain ; Perwakilan Kantor Staf Presiden, Perwakilan Panglima TNI, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kepala Badan Pusat Statistik, Badan Pangan Nasional, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Satgas Pangan Polri, Badan Urusan Logistik (Bulog), para Kepala Daerah dan Forkopimda se-Indonesia.

Hasil :

1. Tingkat inflasi Kota Pekalongan Bulan Mei 2025 (mengacu Tegal sebagai SBH) sebesar -0,44.
2. Narasumber Badan Pangan Nasional menyampaikan perkembangan harga pangan tingkat produsen dan konsumen. Pada tingkat produsen yang perlu menjadi perhatian adalah komoditas ayam ras pedaging, kedelai biji kering, gabah kering giling. Sedangkan di tingkat konsumen komoditas yang menjadi perhatian adalah bawang putih Indonesia Timur, daging kerbau beku, beras medium zona 3, minyakita, beras medium zona 2, dan beras medium zona 1.
3. Narasumber BPS menyampaikan inflasi bulan ke bulan (Mei 2025 terhadap April 2025) sebesar -0,37%. Berdasarkan data BPS per 2 Juni 2025, sebagian besar provinsi mengalami deflasi (31 provinsi). Kelompok makanan, minuman, dan tembakau memberikan andil deflasi terbesar pada Mei 2025. Sementara itu komoditas penyumbang andil terbesar dalam inflasi periode ini adalah tomat, beras, dan emas.
4. Narasumber BULOG menyampaikan data pasokan dan realisasi distribusi Minyakita tahun 2025. Realisasi pasokan Minyakita sampai dengan 31 Mei 2025 sebanyak 42.240.136 liter. Realisasi distribusi sampai dengan 31 Mei 2025 telah mencapai 39.122 kiloliter.
5. Narasumber JAMDATUN beberapa strategi penegakan hukum untuk menjaga pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi, yaitu dengan pengawasan distribusi dan ketersediaan barang pokok, pendampingan hukum dalam percepatan realisasi belanja negara dan daerah, penindakan terhadap praktik ekonomi ilegal yang mengganggu stabilitas harga, perlindungan bagi sektor produktif, dan sinergi intelejen yustisial untuk deteksi dini.
6. Narasumber Kemendag menyampaikan upaya stabilisasi pasokan dan harga minyak goreng dan komoditas terpilih. Realisasi Program Minyak Goreng Rakyat hasil kewajiban pasok domestik bulan April sebesar 149.181 ton dan bulan Mei mencapai 142.353 yang seluruhnya dalam bentuk Minyakita. Ketersediaan minyak goreng second brand dan kemasan premium mencukupi.
7. Narasumber Kementan menyampaikan upaya pengamanan produksi pangan. Potensi luas panen padi di Bulan Mei, 5 tertinggi di Jabar, Jatim, Sulsel, Jateng, dan NTT. 5 Kabupaten tertinggi potensi panen bulan Mei yaitu Indramayu, Subang, Pinrang, Karawang dan Bone. Harga rata-rata GKP di Tk. Petani sebesar Rp6.588,-/kg atau lebih tinggi sebesar 1,35 dari HPP Rp6.500,-/kg, dan naik sebesar 0,61% dibandingkan dengan tanggal sebelumnya.
8. Narasumber Kantor Staf Presiden melaporkan hasil pemantauan harga pangan strategis. Komoditas yang status harganya tidak aman adalah Minyakita, bawang putih, beras medium (zona 3). Komoditas dengan disparitas harga tinggi adalah cabai rawit merah,

cabai merah keriting, dan bawang merah.

9. Narasumber Satgas Pangan Polri menyampaikan rekomendasi agar Kementerian / Lembaga terkait membantu mengawasi kelancaran distribusi Minyakita dari pihak produsen dan distributor ke retail modern dan pasar tradisional antisipasi adanya produsen yang menjual tidak sesuai ketentuan. Serta pentingnya menjaga ketersediaan stok Minyakita di tiap provinsi.
10. Narasumber Sekjen Kemendagri menyampaikan pelaksanaan program prioritas presiden. Saat ini terdapat 260 pemerintah daerah yang belum mengusulkan lahan satuan pelayanan pemenuhan gizi. Terdapat 10 kabupaten/kota yang belum menetapkan Perkada pembebasan BPHTB dan retribusi. Pemeriksaan Kesehatan Gratis dilaksanakan di 9.489 Puskesmas di 507 Kab/Kota: Perlu percepatan pelaksanaan PKG di 7 Kabupaten, 779 Puskesmas yang belum melaksanakan PKG. Terdapat 210 Pemda yang belum mengirimkan data usulan calon lahan pembangunan sekolah rakyat tahap II. Progres pelaksanaan musyawarah desa khusus pembentukan koperasi desa/kelurahan merah putih mencapai 93.58%.
11. Narasumber TNI menyampaikan kegiatan TNI dalam mendukung program prioritas nasional. Salah satunya adalah dengan penyiapan dapur sehat yang tahap 1 yang saat ini telah tersedia di 190 lokasi. Dalam rangka swasembada pangan, TNI saat ini fokus pada pendampingan luasan tanam hingga membantu BULOG untuk Program Serap Gabah Petani. Sedangkan untuk pengentasan kemiskinan, TNI saat ini tetap melaksanakan program unggulan, di antaranya TMMD dan Bhaksos. TNI merekomendasikan agar semua Pemda untuk bersinergi dengan TNI, Polri, dan komponen lain dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional dan pengentasan kemiskinan serta menjaga stabilitas pengendalian inflasi guna mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.

- Rapat Koordinasi minggu II bulan Juni 2025 membahas langkah konkrit pengendalian inflasi di daerah :

Hari / Tanggal : Selasa / 10 Juni 2025

Tempat : Ruang Dua Negeri Setda Kota Pekalongan

Jl. Mataram No. 1 Pekalongan

Rapat dipimpin oleh Sekjen Kementerian Dalam Negeri Tomsu Tohir secara zoom meeting. Peserta rapat antara lain ; Perwakilan Kantor Staf Presiden, Perwakilan Panglima TNI, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kepala Badan Pusat Statistik, Badan Pangan Nasional, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Satgas Pangan Polri, Badan Urusan Logistik (Bulog), para Kepala Daerah dan Forkopimda se-Indonesia.

Hasil :

1. Narasumber Badan Pangan Nasional menyampaikan perkembangan harga pangan tingkat produsen dan konsumen. Pada tingkat produsen yang perlu menjadi perhatian adalah kedelai biji kering dan gabah kering giling. Sedangkan di tingkat konsumen komoditas yang menjadi perhatian adalah bawang putih Indonesia Timur, daging kerbau beku, beras premium, beras medium, Minyakita, dan minyak goreng curah.
2. Narasumber BPS menyampaikan bahwa secara historis tahun 2021-2025, pada bulan Mei dominan terjadi inflasi. Inflasi tertinggi terjadi pada Mei 2022 sebesar 0,40 persen.

Sedangkan terendah terjadi pada Mei 2025 yang mengalami deflasi sebesar 0,37 persen. Pada M1 Juni 2025, terdapat 12 provinsi yang mengalami kenaikan IPH, 1 provinsi stabil, dan 25 provinsi yang mengalami penurunan IPH dibandingkan bulan sebelumnya. Komoditas penyumbang andil kenaikan IPH di 12 Provinsi yang mengalami kenaikan IPH adalah beras dan daging ayam ras.

3. Narasumber BULOG menyampaikan realisasi pengadaan GKP sebesar 3,3 juta ton GKP dan realisasi beras sebesar 725 ribu ton, jadi total pengadaan beras Dalam Negeri tahun 2025 sebesar 2.510.557 Ton, sehingga total stok Bulog saat ini mencapai 4 juta ton.
4. Narasumber JAMDATUN menyampaikan bahwa Kejaksaan telah melakukan kegiatan pendampingan hukum pengendalian inflasi daerah sebanyak 87 kegiatan baik di Kejaksaan Tinggi maupun Kejaksaan Negeri.
5. Narasumber Kemendag menyampaikan Rata-rata harga Minyak Goreng pada Minggu Keempat Mei 2025 (dibandingkan bulan sebelumnya/MIM): Kemasan Premium (tidak diregulasi) Rp22.331/liter (+0,36%), MINYAKITA Rp16.853/liter (-1,32%). Harga minyak goreng kemasan tercatat sedikit mengalami kenaikan namun dapat ditahan dengan adanya Minyakita. Meskipun demikian, secara rata-rata nasional MINYAKITA justru terkoreksi akibat intervensi yang dilaksanakan bersama Produsen dan BUMN Pangan (fokus distribusi guna mengisi pasokan di pasar rakyat).
6. Narasumber Kementan menyampaikan perkembangan stok dan harga pangan strategis. Guna memperkuat ketahanan & kemandirian pangan, dihimbau agar setiap daerah mampu secara mandiri memenuhi kebutuhan/konsumsi dengan memberdayakan petani, meningkatkan produksi, membangun skala kawasan sentra, membangun sistem logistik, dan memperlancar distribusi.
7. Narasumber Kantor Staf Presiden melaporkan hasil pemantauan harga pangan strategis. Komoditas yang status harganya tidak aman adalah Minyakita, bawang putih, beras medium (zona 3). Komoditas dengan disparitas harga tinggi adalah cabai rawit merah, cabai merah keriting, bawang merah, jagung tk peternak, telur ayam ras, dan daging ayam ras.
8. Narasumber Satgas Pangan Polri menyampaikan bahwa tren harga rata-rata nasional beras medium sudah berada di atas HET sejak awal tahun 2024. Peningkatan koordinasi lintas instansi perlu dilakukan untuk memastikan monitoring stok beras secara berkala, memperketat pengawasan distribusi, serta melakukan penindakan tegas terhadap praktik penimbunan dan pelanggaran Harga Eceran Tertinggi (HET).
9. Narasumber Sekjen Kemendagri menyampaikan pelaksanaan program prioritas presiden. Pada per 9 Juni 2025 terdapat 231 pemerintah daerah yang belum mengusulkan lahan satuan pelayanan pemenuhan gizi, 9 kabupaten/kota yang belum menetapkan Perkada pembebasan BPHTB dan retribusi PBG, 751 Puskesmas yang belum melaksanakan PKG, 208 Pemda yang belum mengirimkan data usulan calon lahan pembangunan sekolah rakyat, dan 6.262 desa/kelurahan yang belum melaksanakan Musyawarah Desa/Kelurahan Khusus dalam rangka pembentukan Koperasi Merah Putih.
10. Narasumber TNI menyampaikan kegiatan TNI dalam mendukung program prioritas nasional. TNI saat ini fokus pada pendampingan luasan tanam hingga membantu BULOG untuk Program Serap Gabah Petani. Sedangkan untuk pengentasan kemiskinan, TNI saat ini tetap melaksanakan program unggulan, di antaranya TMMD dan Bhaksos. TNI merekomendasikan agar semua Pemda untuk bersinergi dengan TNI, Polri, dan komponen lain dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional dan pengentasan kemiskinan serta menjaga stabilitas pengendalian inflasi guna mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.

- Rapat Koordinasi minggu III bulan Juni membahas langkah konkrit pengendalian inflasi di daerah tahun 2025 :

Hari / Tanggal : Senin / 16 Juni 2025

Tempat : Ruang Dua Negeri Setda Kota Pekalongan

Jl. Mataram No. 1 Pekalongan

Rapat dipimpin oleh Sekjen Kementerian Dalam Negeri Toms Tohir secara zoom meeting. Peserta rapat antara lain ; Perwakilan Kantor Staf Presiden, Perwakilan Panglima TNI, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kepala Badan Pusat Statistik, Badan Pangan Nasional, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Satgas Pangan Polri, Badan Urusan Logistik (Bulog), para Kepala Daerah dan Forkopimda se-Indonesia.

Hasil :

1. Sekjen Kemendagri, Toms Tohir. menyampaikan pelaksanaan program prioritas presiden. Pada per 14 Juni 2025 terdapat 191 pemerintah daerah yang belum mengusulkan lahan satuan pelayanan pemenuhan gizi, 5 dan 6 kabupaten/kota yang belum menetapkan Perkada pembebasan BPHTB dan retribusi PBG, 723 Puskesmas yang belum melaksanakan PKG, 189 Pemda yang belum mengirimkan data usulan calon lahan pembangunan sekolah rakyat, dan 3.875 desa/kelurahan yang belum melaksanakan Musyawarah Desa/Kelurahan Khusus dalam rangka pembentukan Koperasi Merah Putih.
2. Narasumber dari Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini menyampaikan historis inflasi pada momen hari raya idul adha. Pada momen tersebut tahun 2021-2023 secara umum terjadi inflasi, namun pada tahun 2024 terjadi deflasi. Sedangkan pada tahun 2025 apabila mengacu pada bulan Mei, tingkat inflasinya adalah -0,37 persen. Sementara itu untuk IPH pada M2 Juni 2025 terdapat 14 provinsi yang mengalami kenaikan IPH, 1 provinsi stabil, dan 23 provinsi mengalami penurunan IPH. Komoditas penyumbang andil kenaikan IPH di 14 provinsi di atas adalah beras dan daging ayam ras.
3. Narasumber Deputi Badan Pangan Nasional menyampaikan perkembangan harga pangan tingkat produsen dan konsumen. Pada tingkat produsen yang perlu menjadi perhatian adalah kedelai biji kering lokal dan gabah kering giling. Sedangkan di tingkat konsumen komoditas yang menjadi perhatian adalah bawang putih Indonesia Timur, daging kerbau beku, beras medium zona 3, beras premium zona 3, beras medium zona 2, beras medium zona 1, Minyakita, dan minyak goreng curah.
4. Narasumber Deputi Kantor Staf Presiden melaporkan hasil pemantauan harga pangan strategis. Komoditas yang status harganya tidak aman adalah beras medium (zona 3). Komoditas dengan dispersitas harga tinggi adalah cabai rawit merah, cabai merah keriting, bawang merah, jagung tk peternak, telur ayam ras, dan daging ayam ras.
5. Narasumber Kementan, Suwandi, menyampaikan produksi, pasokan, dan persediaan bahan pangan strategis. Harga rata-rata GKP di tingkat petani sebesar Rp.6.549,-/kg atau lebih tinggi sebesar 0,75 dari HPP Rp.6.500,-/kg dan turun sebesar 0,06% dibandingkan tanggal sebelumnya. Harga rata-rata jagung kering panen tercatat Rp.5.093,- per tanggal 14 Juni 2025.
6. Narasumber Kemendag menyampaikan rata-rata harga Minyak Goreng pada Minggu

Kedua Juni 2025 (dibandingkan bulan sebelumnya/MtM) Kemasan Premium (tidak diregulasi) Rp22.292/liter (+0,07%) dan MINYAKITA Rp16.820/liter (-1,09%). Harga minyak goreng kemasan tercatat sedikit mengalami kenaikan, namun dapat ditahan dengan adanya Minyakita. Meskipun demikian, secara rata-rata nasional MINYAKITA justru terkoreksi akibat intervensi distribusi ke pasar rakyat yang dilaksanakan oleh Produsen (jaringannya) dan BUMN Pangan (fokus distribusi guna mengisi pasokan pedagang dalam pasar rakyat).

7. Narasumber BULOG, Rini Andrida menyampaikan realisasi pengadaan GKP sebesar 3,4 juta ton GKP dan realisasi beras sebesar 723 ribu ton, jadi total pengadaan beras Dalam Negeri tahun 2025 sebesar 2.562.413 Ton, sehingga total stok Bulog saat ini mencapai 4,1 juta ton.
8. Narasumber Satgas Pangan Polri menyampaikan upaya yang telah dilakukan dengan rapat koordinasi terkait pendistribusian beras dan SPHP dan bantuan pangan bersama K/L terkait. Mengintruksikan kepada jajaran guna memperketat pengawasan jalur pendistribusian guna memastikan beras SPHP sampai ke tangan konsumen yang berhak dengan harga yang sesuai serta mencegah terjadinya penimbunan dan penyalahgunaan.
9. Narasumber JAMDATUN menyampaikan bahwa realisasi yang diarahkan secara tepat sasaran dapat menjadi instrument utama untuk menjaga daya beli masyarakat, menciptakan lapangan kerja, mencegah PHK massal, dan mengendalikan inflasi di daerah secara simultan.
10. Narasumber TNI menyampaikan kegiatan TNI dalam mendukung program prioritas nasional. TNI saat ini fokus pada pendampingan luasan tanam hingga membantu BULOG untuk Program Serap Gabah Petani. Sedangkan untuk pengentasan kemiskinan, TNI saat ini tetap melaksanakan program unggulan, di antaranya TMMD dan Bhaksos. TNI merekomendasikan agar semua Pemda untuk bersinergi dengan TNI, Polri, dan komponen lain dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional dan pengentasan kemiskinan serta menjaga stabilitas pengendalian inflasi guna mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.

- Rapat Koordinasi minggu IV bulan Juni membahas langkah konkrit pengendalian inflasi di daerah tahun 2025 :

Hari / Tanggal : Senin / 23 Juni 2025

Tempat : Ruang Dua Negeri Setda Kota Pekalongan

Jl. Mataram No. 1 Pekalongan

Rapat dipimpin oleh Sekjen Kementerian Dalam Negeri Toms Tohir secara zoom meeting. Peserta rapat antara lain ; Menteri Pariwisata, Perwakilan Kantor Staf Presiden, Perwakilan Panglima TNI, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kepala Badan Pusat Statistik, Badan Pangan Nasional, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Satgas Pangan Polri, Badan Urusan Logistik (Bulog), para Kepala Daerah dan Forkopimda se-Indonesia.

Hasil :

1. Sekjen Kemendagri, Toms Tohir, menyampaikan mengenai kondisi inflasi provinsi dan kab/kota di Indonesia. Rentang target inflasi nasional 2,5 +/- 1 %. Berdasarkan data rilis BPS tanggal 2 Juni 2025, Inflasi per-provinsi (y-o-y) tertinggi adalah provinsi Papua

Pegunungan (5,75%) dan terendah Provinsi Papua Barat (-1,51%). Provinsi dengan IPH tertinggi pada minggu ketiga bulan Juni adalah Sulawesi Tenggara (1,34). Sekjen Kemendagri menghimbau untuk wilayah yang IPH-nya masih tinggi untuk berupaya mengontrolnya sehingga tidak membuat harga-harga komoditas menjadi naik.

2. Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri Wardhana, menyampaikan tentang sosialisasi edaran meteri pariwisata tentang penyelenggaraan wisata yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Beliau menghimbau agar para pengelola pariwisata dan pemerintah daerah agar menerapkan CHSE, menerapkan standar usaha keselamatan pariwisata berbasis resiko, berkoordinasi dengan berbagai K/L terkait, memberikan himbauan pada daya tarik wisata yang berpotensi terjadi kepadatan, aktif pada sosial media dan menghimbau pelaksanaan SOP. Telah dipersiapkan juga 22 modul CHSE untuk mendukung pelaksanaan wisata yang aman dan nyaman.
3. Narasumber dari Deputy Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini menyampaikan bahwa dalam 5 tahun terakhir, inflasi pertengahan tahun (Juni, y-to-d) utamanya disumbang oleh komponen harga bergejolak. Adapun komoditas yang sering muncul sebagai penyumbang andil inflasi y-to-d pada pertengahan tahun adalah beras. Pada Mei 2025, inflasi secara y-to-d utamanya disumbang oleh komponen inti dengan andil inflasi sebesar 0,76% kemudian diikuti oleh komponen harga bergejolak dengan andil inflasi sebesar 0,23%. Adapun komoditas penyumbang inflasi secara 7-to-d pada Mei 2025 adalah emas perhiasan, tarif air minum PAM, beras, cabai merah, minyak goreng, dan kopi bubuk.
4. Narasumber Kemendag menyampaikan perkembangan harga komoditas nasional. Isu saat ini adalah harga Minyakita di atas HET, yaitu Rp.16.706/liter. Saat ini harga Minyakita di 9 provinsi sudah melebihi 10% di atas HET. Provinsi NTT dan Papua Selatan memiliki rata-rata harga Minyakita tertinggi, kisaran Rp.18.000-Rp.18.133/liter. Telah dilakukan beberapa upaya optimalisasi pendistribusian Minyakita.
5. Narasumber Deputy Kantor Staf Presiden melaporkan hasil pemantauan harga pangan strategis. Komoditas yang status harganya tidak aman adalah beras medium (zona 3), bawang merah, dan daging ayam ras. Komoditas dengan dispersitas harga tinggi adalah cabai rawit merah, cabai merah keriting, bawang merah, jagung tk peternak, telur ayam ras, dan daging ayam ras.
6. Narasumber Badan Pangan Nasional menyampaikan perkembangan harga pangan tingkat produsen dan konsumen. Disampaikan juga bahwa program nasional Zero Over Dimension Over Load (ODOL) menimbulkan tantangan besar dalam distribusi pangan. Diperlukan sinergi kebijakan lintas sektor agar penanganan ODOL tetap menjaga kelancaran, khususnya Pemerintah Daerah diharapkan untuk menemukan solusi terbaik dalam menjaga ketersediaan dan stabilitas pasokan pangan.
7. Narasumber Kementan, Suwandi, menyampaikan produksi, pasokan, dan persediaan bahan pangan strategis. Harga rata-rata GKP di tingkat petani sebesar Rp.6.626,-/kg atau lebih tinggi sebesar 1,94 dari HPP Rp.6.500,-/kg dan naik sebesar 0,73 % dibandingkan tanggal sebelumnya. Harga rata-rata jagung kering panen tercatat Rp.5.058,- per tanggal 21 Juni 2025. HAP bawang merah tingkat konsumen adalah Rp.36.500-41.5000, sedangkan untuk cabai merah adalah Rp.37.000-55.000. Upaya tetap dilakukan untuk menstabilkan harga dan pasokan di tingkat aman.
8. Narasumber BULOG, Rini Andrida menyampaikan realisasi distribusi Minyakita tahun 2025 periode 1 Januari - 19 Juni 2025 sebanyak 44.085.496 liter baik melalui saluran distribuor (D2), RPK, pedagang di pasar pantauan SP2KP, maupun toko pengecer lainnya. Penjualan Minyakita tertinggi tahun 2025 terjadi di bulan Maret sebanyak 10.570.770 liter dikarenakan bertepatan dengan bulan Ramadhan.
9. Narasumber Satgas Pangan Polri menyampaikan saat ini harga livebird mengalami

kenaikan baik secara nasional sebesar 5,7 % maupun di Pulau Jawa sebesar 11,0 % dibandingkan minggu sebelumnya. Namun demikian, harga masih berada di bawah Harga Acuan yaitu sekitar 26,5% lebih rendah secara nasional dan 28% lebih rendah di Pulau Jawa. Hal ini perlu menjadi perhatian bersama untuk menjaga keberlangsungan usaha peternak mandiri.

10. Narasumber Direktur Pertimbangan Hukum Kejaksaan, Sila H Pulungan, menyampaikan tindak lanjut hasil rakor pengendalian inflasi daerah minggu ke-3 Juni 2025, yaitu mendorong pemerintah daerah untuk melaksanakan percepatan realisasi belanja APBD, khususnya belanja infrastruktur ekonomi, ketahanan pangan, program padat karya dan keterkaitan dengan pengendalian inflasi daerah.
11. Narasumber TNI menyampaikan kegiatan TNI dalam mendukung program prioritas nasional. TNI saat ini fokus pada pendampingan luasan tanam hingga membantu BULOG untuk Program Serap Gabah Petani. Sedangkan untuk pengentasan kemiskinan, TNI saat ini tetap melaksanakan program unggulan, di antaranya TMMD dan Bhaksos. TNI merekomendasikan agar semua Pemda untuk bersinergi dengan TNI, Polri, dan komponen lain dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional dan pengentasan kemiskinan serta menjaga stabilitas pengendalian inflasi guna mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.

- Rapat Koordinasi minggu V bulan Juni membahas langkah konkrit pengendalian inflasi di daerah tahun 2025 :

Hari / Tanggal : Senin / 30 Juni 2025

Tempat : Ruang Dua Negeri Setda Kota Pekalongan

Jl. Mataram No. 1 Pekalongan

Rapat dipimpin oleh Wamendagri, Ribka Haluk, secara zoom meeting. Peserta rapat antara lain ; Menteri Kesehatan, Perwakilan Kantor Staf Presiden, Perwakilan Panglima TNI, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kepala Badan Pusat Statistik, Badan Pangan Nasional, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Satgas Pangan Polri, Badan Urusan Logistik (Bulog), para Kepala Daerah dan Forkopimda se-Indonesia.

Hasil :

1. Sekjen Kemendagri, Tomsy Tohir, menyampaikan data daerah-daerah yang telah dan yang belum melaksanakan upaya-upaya konkrit dalam penanganan inflasi. Per tanggal 30 Juni 2025, terdapat 9 pemda yang telah melakukan seluruh 6 upaya konkrit, 60 pemda melakukan 4 s/d 5 upaya, 213 pemda melakukan 1 s/d 3 upaya, dan 232 pemda belum melakukan upaya konkrit sama sekali. Sekjen Kemendagri mengucapkan apresiasi kepada pemda yang telah melakukan seluruh upaya konkrit penanganan inflasi dan menekankan kepada semua pemda agar bersungguh-sungguh dalam melakukan upaya-upaya pengendalian inflasi.
2. Narasumber dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia menyampaikan perkembangan program pembangunan 3 juta rumah. Arah strategis yang disampaikan antara lain agar Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota agar segera mengambil peran bergotong royong menyukseskan program 3 juta rumah dan tidak perlu ragu untuk mengalokasikan anggaran pembangunan dan renovasi rumah

tidak layak huni.

3. Menteri Kesehatan, Budi Gunadi S, menyampaikan evaluasi program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG). Target tahun ini adalah 50 juta masyarakat. Berdasarkan data Kemenkes per tanggal 28 Juni 2025 telah tercapai 11.105.921 pendaftar yang tersebar di 10.092 puskesmas, 511 kab/kota, 38 provinsi. Jawa Tengah menjadi provinsi dengan jumlah kehadiran PKG terbanyak yaitu 4.137.136 orang.
4. Kepala BPS, Amalia A. Widyasanti, menyampaikan perkembangan harga di minggu ke IV Juni 2025. Pada periode tersebut terdapat 16 provinsi yang mengalami kenaikan IPH, sementara 21 provinsi mengalami penurunan dibandingkan bukan sebelumnya, adapun 1 provinsi tercatat relatif stabil.
5. Deputi Bapanas, I Gusti Ketut Astawa, menyampaikan posisi kondisi pangan di tingkat produsen. Harga pangan di tingkat produsen di bawah harga HPP/HAP yang perlu menjadi perhatian adalah ayam ras pedaging, kedelai biji kering, dan GKG. Disampaikan pula upaya-upaya yang telah dilakukan Bapanas dalam mengendalikan harga pangan.
6. Narasumber Kantor Staf Presiden menyampaikan komoditas yang perlu menjadi perhatian, yaitu beras medium. Selain itu komoditas bawang merah, cabai rawit merah, dan daging ayam ras juga termasuk komoditas dengan status harga tidak aman dan disparitas harga tinggi.
7. Narasumber Kementerian Pertanian, Suwandi, menyampaikan upaya pengawasan terhadap anomali kenaikan harga beras. Pemantauan Kementan dan Satgas Pangan terhadap mutu kualitas, timbangan, berat, HET, izin, dll dilakukan di 10 Provinsi menemukan bahwa harga beras medium ada 95,12% yang tidak sesuai HET atau melebihi HET, 88,24% tidak sesuai regulasi, dan 9,38 % tidak sesuai berat kemasan. Untuk beras premium, sebanyak 85,56% tidak sesuai regulasi, 59,78% harganya berada di atas HET, dan 21,66% beratnya tidak sesuai label kemasan.
8. Narasumber Kementerian Perdagangan menyampaikan perkembangan harga Minyakita. Harga rata-rata nasional harian per Juni 2025 adalah Rp.16.683/liter, harga ini masih di atas HET yaitu Rp.15.700. Telah dilakukan upaya-upaya untuk menstabilkan harga

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

◦ **Evaluasi Kebijakan Pengendalian Inflasi di Daerah**

Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di Kota Pekalongan pada Triwulan II 2025 adalah sebagai berikut :

1. Pentingnya penguatan koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di Kota Pekalongan dan koordinasi dengan dengan TPID Provinsi Jawa Tengah dalam upaya pemenuhan kebutuhan dan menjaga kelancaran distribusi komoditas pangan di Kota Pekalongan.
2. Kebutuhan akan inovasi dalam mendukung ketersediaan pangan sepanjang tahun dan kelancaran distribusi serta indikasi surplus devisa pangan di masing-masing daerah.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

◦ **Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Inflasi di Daerah**

Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di Kota Pekalongan pada Triwulan II 2025 adalah sebagai berikut :

1. Pemantauan harga dan ketersediaan pasokan komoditas pangan serta kelancaran distribusi yang
2. Mengidentifikasi Strategi Aksi mengantisipasi ketersediaan pangan dalam kondisi yang tidak ideal.
3. Melanjutkan dan meningkatkan koordinasi antar anggota TPID untuk menjaga ketersediaan pasokan dan kestabilan harga.